

SISTEM KOMUNIKASI POLITIK LIBERTARIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PROGRAM *INDONESIA LAWYER CLUB (ILC) TVONE*)

Hanafi

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Desain

Email: hanafi256@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan, mengetahui berbagai data dan informasi mengenai atraksi komunikasi politik di Indonesia (kasus program tayangan *Indonesia Laweyer Club (ILC) Tv-ONE*). Sehingga dengannya ditemukan dan diperoleh gambaran mengenai praktek system libertarian dalam implementasi komunikasi politik media massa Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif berdasarkan observasi dan studi literature. Adapun hasil yang dapat dijelaskan bahwa program yang diasuh jurnalis senior Karni Ilyas ini begitu bebas dan leluasa menampilkan berbagai tema diskusi, baik menyangkut persoalan hukum, idelogi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer, dan sebagainya. Acara ini dikemas secara lugas, transparan, bahkan blak-blakan menyangkut masalah kenegaraan di berbagai bidang di atas. TV One sendiri sebagai salah satu media swasta nasional di Indonesia, muncul berbarengan dengan *euphoria* kebebasan yang luar biasa. Ditinjau dari berbagai sisinya program ILC ini menyiratkan atraksi komunikasi politik yang memenuhi ciri-ciri sebagai media libertarian.

Kata kunci : sistem komunikasi politik, libertarian, media TV One

Abstract

This paper aims to find, find out various data and information about the attractions of political communication in Indonesia (the case of the Indonesia Laweyer Club (ILC) Tv-ONE program. this is a type of qualitative research using descriptive methods based on observation and literature studies, the results that can be explained that the program cared for by senior journalist Karni Ilyas is so free and free to display a variety of discussion themes, both concerning legal issues, ideology, politics, economics, social culture, military, etc. This program is packaged in a straightforward, transparent, and even blunt manner with regard to state affairs in various fields above TV One itself as one of the national private media in Indonesia, appeared together with the euphoria of extraordinary freedom. from various the rest of this ILC program implies the attraction of political communication that fulfills its characteristics as a libertarian media.

Keywords : *political communication system, libertarian, TV One media*

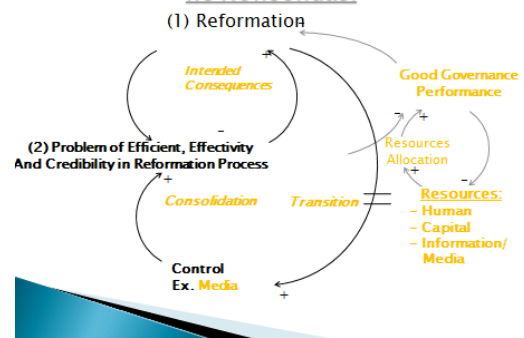
1. PENDAHULUAN

Komunikasi dan Sistem Politik di Indonesia sebagai bangsa dan negara yang menjadi bagian dari bangsa-bangsa di Asia, adalah produk yang tak bisa terlepas dari masyarakat dan lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Hal ini kemudian akan menjadi pembeda identitas sosiologis-psikologis antara pola-pola komunikasi dan system social budaya yang hidup dan berlangsung di wilayah Asia atau Afrika dengan identitas yang ada di Eropa atau di wilayah Amerika misalnya. Walaupun terdapat kesamaan dalam symbol-simbol budaya kosmopolis yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi bidang kominfo yang menyamaratakan gaya dan penampilan pola dan system komunikasi yang ada dan berlaku di dunia pada umumnya..

Pasca Reformasi 1998 kehidupan kenegaraan di Indonesia di bidang social politik sesuai kerangka demokratis mengalami dinamika keterbukaan dan kebebasan yang sangat dinamis. Setelah lebih kurang 32 tahun berada dalam kungkungan rezim militer yang otoritarian, system bernegara termasuk sistem komunikasi terkait system politik di dalamnya, mendapatkan angin kebebasan yang bahkan seakan tak bisa diikuti dan dibatasi oleh rambu-rambu regulasi yang ada. Gejala-gejala ini mendorong menguatnya system komunikasi dan politik yang Libertarian, dalam arti didasarkan pada nilai-nilai kebebasan (*liberty*) secara mutlak. Realitas kebebasan yang terbuka luas ini, secara langsung mengundang merebaknya gejala “*free fight liberalism*” dalam system politik yang pada kenyataannya tengah mencari bentuk, termasuk dalam konteks kebebasan pers dan media massa di dalamnya.

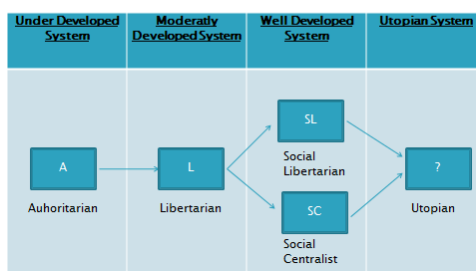
Under Developed System	Moderately Developed System	Well Developed System	Utopian System
<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah memiliki kekuasaan yang penuh utk mengatur pengelolaan media Sistem kepemilikan bisa saja dimiliki swasta dan pemerintah Orientasi stabilitas sosial Saluran terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> Media independen dan tidak terikat pemerintah Struktur sosial masyarakat dinamis dan kompetitif Pendidikan masy sudah maju Saluran tersedia banyak 	<p>Soc Lib :</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguasaan media ditangani penuh swasta Masyarakat relatif lebih maju dalam pendidikan Saluran komunikasi massa terbatas <p>Soc Central:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemilikan media oleh pemerintah Masyarakat relatif lebih maju dlm pendidikan Saluran komunikasi terbatas 	<p>Suatu masyarakat serba maksimum dalam hal ketersediaan saluran komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stabilitas sosial Kebebasan individu Pluralisme Peluang untuk mendapatkan akses pada media Kemampuan media menetapkan dan mengatur dirinya

Media Demokratik Partisipan dari Transisi ke Konsolidasi



Lowenstien Progression Typology

(Ralph L Lowenstein, 1976)



Tulisan ini juga bertolak dari realitas bahwa pengetahuan komunikasi dalam system politik yang dimiliki khalayak di Indonesia, ditentukan oleh efek dari konsumsi dan terpaan media secara luas dan bebas. Efek ini dapat diperkuat atau dilemahkan oleh intensitas atraksi dan perilaku khalayak itu sendiri yang tidak lain berlangsung melalui proses komunikasi itu sendiri. Pengamatan menunjukkan bahwa pengetahuan khalayak di Indonesia terkait masalah komunikasi dan kepolitikan dapat diperkaya dan dipengaruhi di antaranya oleh isi/konten pemberitaan media dan juga oleh hasil tindak komunikasi yang bervariasi. Di samping itu menjelaskan juga bahwa pengetahuan dan sikap khalayak tidak hanya pasif dan secara linier dipengaruhi oleh terpaan media, melainkan juga secara aktif khalayak secara bebas dan terbuka menambah pengetahuan dan pemahaman politik mereka lewat intensitas berbagai komunikasi (diskusi-diskusi yang beragam temanya). Tidak jarang khalayak melalui komunikasi, dapat saling berbagi pengetahuan dan berbagi informasi tentang konten sebuah pemberitaan media. Sebuah konten atau informasi yang diberitakan media, seringkali di re-evaluasi oleh khalayak dalam berbagai diskusi, sehingga kemudian dapat dikukuhkan atau dibantah keaslian maupun urgensinya. Disini khalayak bersikap aktif dan bebas memberikan penilaian, bahkan sanggahan terhadap sebuah informasi atau berita yang disuguhkan media. Proses komunikasi juga mengakibatkan pengetahuan dan wawasan khalayak menjadi bertambah kaya dan luas, yang dibentuk melalui proses dialog dan diskusi antar mereka. Kecenderungan ini juga menggambarkan paradigma dalam kajian ilmu dan teori komunikasi yang tidak lagi murni berada pada tataran positivistic, melainkan telah bergeser menuju paradigma post positivistic. Sebagai konsekuensinya berakibat teori-teori yang mendukungnya tidak relevan lagi seandainya masih mengasumsikan bahwa dalam sebuah proses komunikasi media, khalayak adalah pasif, media bersifat dominan atau pola komunikasi media hanya bersifat linier atau searah. Terkait konteks inilah kajian selanjutnya akan meyoroti salah satu program media, dalam hal ini program yang disiarkan TV One yakni ILC.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai tinjauan teoritis, penelitian yang tersaji dalam makalah ini menggunakan landasan teoritis dan konsepsi yang terkait dengan pembicaraan seputar system politik libertarian di Indonesia, khususnya dalam kasus program tayangan Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One berikut deskripsi menyangkut fakta maupun fenomena yang muncul di acara tersebut.

ILC TVOne merupakan acara diskusi terbuka yang menghadirkan nara sumber para pihak dari berbagai kalangan yang ada dalam sistem politik nasional, baik supra maupun infrastruktur politik. Sesuai kemasannya yang transparan, sering kali pemirsa kita disuguhi oleh sengitnya atraksi komunikasi bahkan perdebatan sengit penuh kepentingan masing-masing, secara emosional ditunjukkan para nara sumber. Kode dan etika jurnalistik seolah sulit direalisasikan, apalagi nilai-nilai kearifan local sangat berat untuk ditegakan. Saling hujat, saling tuduh, memaki dan menghina banyak mewarnai acara diskusi ini. Tak jarang data dan informasi yang diwacanakan oleh narasumber belum teruji secara empiric, berbagai isu/kabar burung kadang langsung diusung atau barangkali informasi yang cenderung bernuansa fitnah pun seolah diperjualbelikan. Dalam konteks sistem libertarian penampilan ILC TVone seperti ini barangkali sah-sah aja sebagai wujud nilai kebebasan pers yang tidak boleh disetting oleh pihak manapun, termasuk penguasa.

Transparansi, keterbukaan, dan kebebasan luas dari segi tampilan acara ILC diTVOne, dapat disaksikan pada hamper setiap episode tayangannya. Salah satu episode yang temanya mengangkat dan mengupas aksi demo massa 212 lalu beberapa waktu silam. Tema yang intinya terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok ini menghadirkan beberapa pihak, antara lain Panglima TNI GatotNurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Perwakilan MUI, Aa Gym, Syaifei Maarif, Cendekiawan Muslim dan mantan Ketua PP Muhamdyah, Perwakilan Ormas Islam dan banyak lagi lainnya. Para nara sumber ini secara terbuka dan bebas memberkan perspektif mereka masing-masing.

Dalam acara ILC ini, dialog dan komunikasi yang mereka langsungkan seolah lepas tanpa adanya batasan, kecuali alokasi waktu, bahkan ketika beradu argumen dengan pihak pemerintah sendiri (TNI dan Polri). Tanpa ewuh-pakewuh, adab sopan santun dan budaya primordial lainnya, para pihak yang berbicara seolah memiliki kebebasan yang sama diantara mereka. Tak jarang bahkan berlangsung tanpa etika, misalnya ketika interupsi pembicaraan satu pihak tertentu. Bahkan debat keras dengan pertengkaran sengit padahal dengan pihak yang notabene adalah pejabat public/Negara atau figure yang menjadi tokoh masyarakat. Debat antara Syafei Maarif dengan salah seorang Ketua MUI, juga antara Tito Karnavian (Kapolri) dengan salah satu dai yang menjadi pengurus sebuah Ormas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program yang diasuh Jurnalis senior Karni Ilyas ini begitu bebas dan leluasa menampilkan berbagai tema diskusi, baik menyangkut persoalan hukum, ideologi, politik, ekonomi, social budaya, militer, dan sebagainya. Acara ini dikemas secara lugas, transparan, bahkan blak-blakan menyangkut masalah kenegaraan di berbagai bidang di atas. TV One sendiri sebagai salah satu media swasta nasional di Indonesia, muncul berbarengan dengan euphoria kebebasan yang sangat luar biasa yang dari berbagai sisinya identic dengan ciri-ciri sebuah media libertarian. Dari sisi kepemilikan media, TV One sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Aburizal Bakri dan kolega bisnisnya, kalangan pengusaha. Sementara di sisi konten media, isi/pemberitaan TVOne sangat menjunjung asas kebebasan sebagai sebuah lembaga pers yang demokratis. Walaupun pada beberapa tayangannya, konten media televisive ini tetap tunduk pada kepentingan ekonomi-bisnis maupun politik-ideology tertentu, terutama pemiliknya. Sehingga kemudian netralitas media ini ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi.

Partisipan Demokratik, Mungkinkah?



PERAN MEDIA PARTISIPAN DEMOKRATIK

INSTRUMENTAL	SUBSTANSIAL
Menginformasikan fakta/data politik	Mengembangkan Literasi Politik
Mengkonstruksi citra politik	"Menginvestigasi" koherensi reputasi politik
Memberi ruang ekspresi politik	Menguatkan transformasi gagasan dan nilai-nilai substansial dalam politik
Melakukan fungsi kontrol	Melakukan kritisisme
Menghibur	Memberdayakan politik warga

ILC TVOne merupakan acara diskusi terbuka yang menghadirkan nara sumber para pihak dari berbagai kalangan yang ada dalam sistem politik nasional, baik supra maupun infrastruktur politik. Sesuai kemasannya yang transparan, sering kali pemirsa kita disuguhi oleh sengitnya atraksi komunikasi bahkan perdebatan sengit penuh kepentingan masing-masing, secara emosional ditunjukkan para nara sumber. Kode dan etika jurnalistik seolah sulit direalisasikan, apalagi nilai-nilai kearifan local sangat berat untuk ditegakan. Saling hujat, saling tuduh, memaki dan menghina banyak mewarnai acara diskusi ini. Tak jarang data dan informasi yang diwacanakan oleh narasumber belum teruji secara empiric, berbagai isu/kabar burung kadang langsung diusung atau barangkali informasi yang cenderung bernuansa fitnah pun seolah diperjualbelikan. Dalam konteks sistem libertarian penampilan ILC TVOne seperti ini barangkali sah-sah aja sebagai wujud nilai kebebasan pers yang tidak boleh disetting oleh pihak manapun, termasuk penguasa. Akan tetapi dalam kerangka

menemukan dan membangun sebuah komunikasi dalam system politik budaya khas timur di Indonesia, dibutuhkan juga kemampuan budaya dan kematangannya tersebut dalam mengadopsi dan mensinergiskannya dengan system yang bebas terbuka. Kemampuan adaptif ini menjaga dan dapat mencegah terjadinya *culture lag* atau *culture shock*, sehingga justeru diharapkan akan menguatkan system komunikasi politik yang tengah dibangun. Apalagi jika mengingat fakta bahwa mediamassa, di Indonesia, baik cetak maupun elektronik dalam pengelolaannya belum jelas alias abu-abu. Pada sisi isi/konten misalnya, media mungkin sangat libertarian, akan tetapi begitu masuk di sisi lain semisal kepemilikan justeru media sangat kapitalis yang cenderung ideologis serta politis atau demi kepentingan profit semata, dalam tinjauan bisnis ekonomi.

Transparansi, keterbukaan, dan kebebasan luas dari segi tampilan acara ILC diTVOne, dapat disaksikan pada salah satu temanya yang mengangkat dan mengupas aksi demo massa 212 lalu beberapa waktu silam. Tema yang intinya terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok ini menghadirkan beberapa pihak, antara lain Panglima TNI GatotNurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Perwakilan MUI, Aa Gym, Syafei Maarif, Cendekiawan Muslim dan mantan Ketua PP Muhamdyah, Perwakilan Ormas Islam dan banyak lagi lainnya. Para nara sumber ini secara terbuka dan bebas memberikan perspektif mereka masing-masing. Dalam acara ILC ini, dialog dan komunikasi yang mereka langsung seolah lepas tanpa adanya batasan, kecuali alokasi waktu, bahkan ketika beradu argumen dengan pihak pemerintah sendiri (TNI dan Polri). Tanpa ewuh-pakewuh, adab sopan santun dan budaya primordial lainnya, para pihak yang berbicara seolah memiliki kebebasan yang sama diantara mereka. Tak jarang bahkan berlangsung tanpa etika, misalnya ketika interupsi pembicaraan satu pihak tertentu. Bahkan debat keras dengan pertengkaran sengit padahal dengan pihak yang notabene adalah pejabat public/Negara atau figure yang menjadi tokoh masyarakat. Debat antara Syafei Maarif dengan salah seorang Ketua MUI, juga antara Tito Karnavian

(Kapolri) dengan salah satu dai yang menjadi pengurus sebuah Ormas.

ILC TVOne, bagaimanapun ditayangkan di ranah public yang bisa jadi diikuti pemirsa di seluruh nusantara. Tentunya isi/konten acara media ini akan menjadi sumber dan input peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakatnya. Bagaimana sebuah tema dengan analisis oleh para narasumber dari berbagai perspektif dan kepentingan sengaja dimunculkan di ranah public secara terbuka dan dikonsumsi secara terbuka pula oleh masyarakat luas. Opini public akan terbentuk, baik secara sosio-kultural maupun kritis-akademis yang empiris. Bagaimana dengan citra pejabat dan charisma kelembagaan formal Negara. Tentu didalamnya terkait juga wibawa penegakan aturan yuridis formal oleh kelembagaan hukum yang ada. Mungkin sebuah pertanyaan sederhana dapat dirumuskan disini terkait, apakah cocok system libertarian diterapkan secara penuh dalam membangun dan mengukuhkan komunikasi dan system politik kenegaraan di Indonesia? Bukankah dengan pola kebebasan yang mutlak dan diserahkan kepada tiap-tiap pihak secara luas justeru melahirkan persaingan bebas tanpa batas. Bukankah adanya kesenjangan social dan ekonomi justeru diakibatkan oleh adanya liberalism yang kapitalistik ini. Dapatkah masyarakat kita yang kental dengan ikatan budaya secara sinergis mengadopsi system libertarian yang utuh.

4. KESIMPULAN

Penerapan sistem libertarian dalam kaitan komunikasi dan system politik pada umumnya di negara-negara Asia termasuk di Indonesia belum bersifat menyeluruh akan tetapi sifatnya masih parsial pada tuntutan kepentingan tertentu. Hal ini secara langsung atau tidak diakibatkan oleh adanya keterikatan dan keterkaitan actor dan media komunikasi dengan budaya masing-masing bangsa. Misalnya dalam pengelolaan media massa semisal Televisi di Indonesia, model libertarian diterapkan baru pada tataran konten/isi berita dan aturan dasar pendirian media yang begitu terbuka lebar bagi setiap warga masyarakat. Sementara pada tataran kepemilikan dan keberpihakan, media masih tunduk dihadapan

kepentingan politik-ideologi atau kepentingan bisnis ekonomi yang ada di belakangnya.

Dengan demikian dalam praktek nyata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai salah satu diantara negara-negara berkembang di Asia, media dengan dinamika pasang surut yang dialaminya berada di tahapan perkembangan sistem yang moderat (libertarian). Sistem mana berada di antara sistem yang otoritarian (*under-developed*) dan sistem yang social-libertarian atau social-centralist (*well-developed*).

5. REFERENSI

Buku-buku:

- Budiardjo, Miriam, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2009. *Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus. Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Cet. Ke-4. Kencana Prenada, Jakarta.
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhtadi, Asep Saeful, 2008. *Komunikasi Politik Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nimmo, Dan, 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*, Goodyear Publishing Company, Santa Monica Cal.
- Mulyana, Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- , (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . (2011). *Komunikasi Lintas Budaya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy & Rackhmat Jalaludin. (2010). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Perkuliahan;

- Muhtadi, Asep S. dan Azis Taufik Hirzi. 2017. *Manajemen & Etika Komunikasi Politik*. Seminar Perkuliahan, Semester II,

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.

Santana, Septiana. 2017. *Sistem Komunikasi Politik, Materi Perkuliahan Semester III, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.*

Taufik Hirzi, Azis, 2017. *Kampanye dan Pemasaran Politik*, Materi Perkuliahan, semester III, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Komunikasi Politik, UNISBA, Bandung.